

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia, sehingga para perusahaan yang ingin menjadi *go public* harus melalui BEI. Bursa Efek Indonesia merupakan penggabungan dari bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya, ada tiga klasifikasi utama sektor yang terdapat di BEI yaitu utama, manufaktur, dan jasa. Manufaktur disebut juga perusahaan industri karena proses bisnisnya adalah pengolahan selain itu ciri dari perusahaan ini adalah produksinya yang biasanya dilakukan secara massal identik dengan pabrik yang menghasilkan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja.

Industri adalah bidang yang usahanya menggunakan ketekunan kerja, keterampilan dan penggunaan alat-alat di bidang pengelolaan hasil bumi kemudian sektor industri dikenal sebagai mata rantai lanjutan dari usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan hasil bumi maupun pertambangan. Bidang industri dalam dunia usaha dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang yang merupakan usaha untuk mengelola barang mentah menjadi barang jadi dan industri jasa yang menawarkan pelayanan jasa dan berperan sebagai pelengkap proses produksi. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bidang usaha yang termasuk dalam sektor manufaktur ini yaitu, sektor industri dasar dan kimia; yang industri dasar mencakup usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau yang masih akan di proses di sektor perekonomian selanjutnya dan industri kimia mencakup usaha pengolahan bahan-bahan terkait kimia dasar yang digunakan pada proses produksi selanjutnya dan industri farmasi, Aneka industri; meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan termasuk komponen penunjangnya, industri barang konsumsi; usaha pengolahan yang mengubah

bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Perekonomian Indonesia (dalam persen)

No	PDB Lapangan Usaha	2018	2019	% Terhadap PDB
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,91	3,88	12,36
2	Pertambangan dan penggalan	2,16	1,81	7,38
3	Industri pengolahan	4,27	4,77	20,93
4	Pengadaan listrik dan gas	5,47	6,04	1,03
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	5,46	5,93	0,08

Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 industri pengolahan yang juga termasuk dalam industri manufaktur merupakan sektor industri yang menjadi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian. Industri sektor industri tumbuh sebesar 4,27% pada tahun 2018 dan 4,77% tahun 2019 jika dibandingkan dengan pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan 5,47% pada tahun 2018 dan 6,04% tahun 2019 industri pengolahan memang tertinggal tapi jika diproyeksikan terhadap PDB industri pengolahan tumbuh sebesar 20,93% sedangkan pengadaan listrik dan gas hanya tumbuh sebesar 1,0% apabila melihat distribusi subsektor yang terdapat dalam PDB sektor industri pengolahan pada periode 2014 hingga 2018 sub sektor industri pengolahan nonmigas selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dibandingkan dengan subsektor industri pengolahan migas. Pada tahun 2018 subsektor industri pengolahan non migas khususnya industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu sebesar 6,25% kemudian diikuti oleh sub sektor industri alat angkut sebesar 1,76% % hal ini lah yang membuat sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menjadi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian.

Berbanding terbalik dari pertumbuhan perekonomian, kinerja industri manufaktur per September 2019 lewat *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia mengalami kemunduran berada di level 49,0. *Manufacturing Purchasing Managers Index* atau *Manufacturing PMI* adalah indikator ekonomi yang menunjukkan prospek perekonomian yang dibuat dengan melakukan survey terhadap sejumlah purchasing manager di sektor manufaktur. Investor di sektor ini menganggap indeks PMI sebagai *leading indicator* yang memberikan gambaran keadaan perekonomian secara keseluruhan mengenai hasil penjualan, upah tenaga kerja, persediaan barang, dan tingkat harga. Indeks PMI Manufaktur dihitung berdasarkan hasil dari survey yang memberikan acuan dinilai 50.0. Apabila angka indeks di atas 50.0, berarti sektor yang disurvei tengah mengalami ekspansi (pertumbuhan) sedangkan jika angka indeks di bawah 50.0, berarti sektor yang disurvei sedang mengalami kontraksi (perlambatan). Kondisi manufaktur Indonesia kian melemah, bahkan pada pertengahan menuju kuartal III, *Manufacturing PMI* berada di posisi 49,0 yang sebelumnya pada bulan Juli 2019 berada di posisi 49,6. Dengan demikian kinerja sektor manufaktur Indonesia dinilai tidak mengalami banyak perubahan signifikan (www.tempo.com)

Berdasarkan pernyataan di atas, industri pengolahan selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 20,93%, namun berdasarkan data *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur Indonesia, kinerja industri mengalami kemunduran sehingga menyebabkan perusahaan mengambil beberapa kebijakan untuk mempertahankan perusahaan mereka. Berdasarkan fenomena tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar perusahaan manufaktur menerapkan prinsip prudenasi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan laporan yang mencerminkan kondisi finansial pada suatu periode akuntansi tertentu dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap setidaknya terdiri dari empat macam laporan keuangan yang sering dipakai dalam melakukan analisis kondisi keuangan perusahaan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas dan satu laporan penjelasan atas akun-akun yang tercantum yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan juga bentuk pertanggung jawaban manajemen yang berusaha menampilkan kinerja terbaik mereka dalam mengelola sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda bahkan berlawanan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena secara garis besar pihak yang terlibat dalam kinerja entitas terbagi menjadi dua macam yaitu pihak yang mengelola entitas atau manajemen (dalam hal ini *agent*) dan pihak yang memberi kepercayaan kepada pengelola atau *shareholder* (dalam hal ini *principal*).

Agen dan prinsipal diasumsikan memiliki kepentingan masing-masing yang sering kali saling berbenturan perbedaan kepentingan atau bisa disebut dengan *agency problem* tersebut dapat menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Brilianti, 2013) karena manajemen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dengan memperoleh kompensasi, namun manajer juga memiliki motivasi tersendiri untuk memaksimalkan kekayaan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Calvin, 2012). Untuk mencegah hal tersebut terjadi, prudensi dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (Apriani, 2015).

Menurut Rohminatin (2016) prudensi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer yang berkaitan dengan kontrak pengguna laporan keuangan sebagai media. Konsekuensinya apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan kerugian biaya dan utang maka kerugian biaya atau

utang tersebut harus segera diakui . Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang memungkinkan menghasilkan laba, pendapatan atau aktiva maka laba pendapatan dan aktiva tersebut tidak boleh langsung diakui sampai kondisi tersebut benar terjadi. prudensi dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas suatu aktiva dari perusahaan tersebut (Savitri, 2016).

Watts (2003) mendefinisikan prudensi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Prudensi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan karena Laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan serta memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan bagi investor dan kreditor. Prudensi juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (Suwardjono, 2010)

Definisi resmi dari prudensi terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mengartikan prudensi sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. prudensi merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi (Astarini, 2011). Kecenderungan seperti itu terjadi karena prudensi menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, akibatnya laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). prudensi memiliki kaidah pokok, yaitu (1) harus mengakui kerugian yang sangat mungkin terjadi, tetapi tidak boleh mengantisipasi laba sebelum terjadi. (2) apabila dihadapkan beberapa pilihan, akuntan diharapkan memilih metode akuntansi yang paling tidak menguntungkan (Suharli, 2009). Selain FASB, Indonesia memiliki

standar yang di dalamnya memicu manajer untuk melakukan prinsip prudensi yang tertulis pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi yang dianut di Indonesia mengakui prinsip prudensi yang tercermin dengan adanya beberapa metode pencatatan yang menimbulkan laporan keuangan prudensi diantaranya :

1. PSAK No 14

PSAK No 14 Tentang Persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan metode *first in first out* (FIFO) dan *Average*. Perusahaan yang menggunakan metode FIFO dan metode average akan menghasilkan laba yang terlihat tinggi karena harga pokok penjualan rendah dan nilai persediaan akhir yang tercatat akan terlihat tinggi sehingga ketika perusahaan menggunakan metode FIFO atau *average* dapat menimbulkan laporan keuangan tidak prudensi namun diantara kedua metode tersebut, metode average merupakan metode yang paling prudensi karena menghasilkan nilai persediaan akhir lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan lebih kecil

2. PSAK No 16

PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan lainnya yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap yang diteliti secara periodik. Metode estimasi aktiva terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit. Metode garis lurus digunakan dalam mengestimasi umur aktiva yang pembebanan biaya penyusutan aktiva akan selalu tetap. Metode Saldo menurun akan menghasilkan pembebanan biaya penyusutan yang selalu turun setiap periodenya, jadi setiap tahunnya biaya penyusutannya akan semakin kecil. Sedangkan metode jumlah unit adalah umur ekonomis aktiva akan diukur dengan jumlah seluruh unit yang dapat dihasilkan sampai aktiva tersebut tidak dapat digunakan untuk produksi.

3. PSAK No 19

PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atau dasar yang sistematis sepanjang masa manfaat. Metode estimasi aset tak berwujud

hampir sama dengan metode estimasi aktiva tetap. Semakin pendek umur ekonomisnya maka akan semakin prudensi karena ketika umur ekonomisnya jumlah pembebanan biaya penyusutan akan tinggi dan berimbas ke laba yang dilaporkan akan prudensi.

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan prudensi di Indonesia, yang dikarenakan beberapa faktor dimana salah satunya adalah masih rendahnya penerapan prinsip prudensi dalam laporan keuangan perusahaan. Seperti yang telah terjadi pada tahun 2019 yang dialami PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) produsen makanan ringan Taro diduga melakukan pelanggaran laporan keuangan setelah lembaga akuntan publik Ernst & Young (EY) mengeluarkan laporan audit investigasi. Salah satu poin penting dari hasil investigasi tersebut adalah terdapat dugaan overstatement pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada earning before interest, tax, depreciation, and amortization (EBITDA). entitas food. (www.investasi.kontan.co.id). Selain itu Dalam kasus Indofarma, Bapepam menemukan bukti-bukti diantaranya, nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (*overstated*) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp28,87 miliar. Akibatnya harga pokok penjualan mengalami *understated* dan laba bersih mengalami *overstated* dengan nilai yang sama (finance.detik.com diakses 12 September 2016). Kasus-kasus yang terjadi pada PT.AISA dan Indofarma dapat di indikasikan bahwa lemahnya penerapan prinsip prudensi. Hal tersebut menyebabkan terlalu tingginya laba bersih dan total aktiva perusahaan. Dalam kasus ini dapat dinilai bahwa perusahaan terlalu optimis dalam menyajikan laporan keuangan sehingga akan berdampak pada salahnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat digunakan sebagai sarana pengawasan untuk meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam mengakui laba, biaya, dan kerugian. Menurut *Forum or Coporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Menurut Setiadi (2011:2) *good corporate governance* secara definitif sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Pada penelitian ini, terdapat berbagai mekanisme *good corporate governance* yang diduga sebagai faktor yang dapat memicu penerapan prudensi pada suatu perusahaan, diantaranya karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk menerapkan prudensi adalah ukuran dewan komisaris. Menurut peraturan OJK NOMOR 33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris merupakan salah satu komponen dari *good corporate governance* yang berfokus pada struktur internal perusahaan. Struktur internal perusahaan sendiri terdiri dari komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Oleh sebab itu, keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer (Afnan, 2014). Dalam menjalankan tugas pengawasannya, dewan komisaris mensyaratkan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, dewan komisaris akan cenderung menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang prudensi (Indrayati, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Veres, dkk (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap prudensi. Hal ini dikarenakan peran dari dewan komisaris ialah mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan sehingga informasi yang dihasilkan tersebut sesuai dengan kebenarannya. Berbanding terbalik dengan Nasr dan Ntim (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap prudensi. Hal ini dikarenakan jumlah dewan komisaris yang

semakin besar dianggap dapat menimbulkan kesulitan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan kinerja manajemen dan menurunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk menerapkan prudensi adalah Karakteristik dewan komisaris. Karakteristik dewan komisaris terkait dengan ukuran komisaris independen perlu diperhatikan agar dalam proses pengawasan yang dilakukan terdapat independensi terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga akan cenderung mensyaratkan akuntansi yang prudensi untuk mencegah sikap oportunistik manajer. Perusahaan juga perlu memiliki komisaris independen yang memiliki keahlian di bidangnya agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari dewan komisaris harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Penelitian yang dilakukan Ahmed dan Duellman (2007) menguji mengenai karakteristik dewan terhadap prudensi menemukan bukti bahwa dewan komisaris berhubungan negatif signifikan dengan prudensi yang diukur dengan ukuran akrual.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk menerapkan prudensi adalah Kepemilikan Asing (foreign ownership). Menurut undang-undang No.25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6, kepemilikan asing adalah warga negara asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah republik indonesia. Kepemilikan asing memberikan pengawasan yang efektif terhadap keuntungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki saham asing yang tinggi akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi (Beuselinck, et al, 2013)

Hal ini didukung oleh peneliti yang dilakukan oleh Kuspratiwi dan widagdo (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap prudensi. Kepemilikan asing memberikan pengawasan yang efektif terhadap keuntungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki saham asing yang tinggi akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi kepemilikan asing mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan yang baik,

sehingga berdampak pada penerapan prudensi (Kuspratiwi dan widagdo, 2014). Namun hasil penelitian (Dudi, dkk, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap prudensi akuntanis

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan masih terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan prudensi dalam suatu perusahaan yang terkait dengan karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu penulis memutuskan melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PRUDENSI (Studi Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)**”

1.3 Perumusan Masalah

Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebebasan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut dinilai. Penerapan prudensi pada laporan keuangan dianggap tepat dilakukan guna menghadapi berbagai kondisi pada perekonomian yang tidak stabil dan membutuhkan kehati-hatian. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip prudensi dengan baik, dimana mereka akan sengaja melebih-lebihkan labanya untuk menarik para investor dan kreditor kedalam perusahaan mereka. Hal ini dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Disinilah prinsip prudensi perlu untuk diterapkan.

Hal-hal yang mendorong penerapan prudensi dalam perusahaan adalah *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan merupakan sarana pengawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam mengakui laba, biaya, dan kerugian. Oleh karena itu perlu diketahui mekanisme *good corporate governance* apa saja yang diduga menjadi faktor yang akan mempengaruhi prudensi yang diterapkan

oleh perusahaan. Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan asing dan prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan asing terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Karakteristik dewan komisaris terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
 - b. Ukuran dewan komisaris terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
 - c. Kepemilikan asing terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan asing dan prudensi akuntanis pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan asing dan prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Karakteristik dewan komisaris terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
 - b. Ukuran dewan komisaris terhadap prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
 - c. Kepemilikan asing terhadap prudensi pada sektor perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti peneliti selanjutnya, akademisi lain yang memiliki kesamaan dalam penelitian, bagi perusahaan, bagi investor dan pemerintah dikemudian hari. Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis mengenai prudensi pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prudensi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing terhadap prudensi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengaruh karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing terhadap prudensi.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu :

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Diharapkan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan apakah penggunaan prudensi dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik terkait karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing terhadap prudensi di perusahaan sektor manufaktur periode 2015-2019.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada investor tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing terhadap prudensi yang digunakan sebagai dalam pelaporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-bab. Sistematika penulisan dimulai dari bab dua dalam penelitian ini secara garis besar, sebagai berikut:

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan informasi dasar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang; Jenis penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian dan saran secara konkrit. Adapun saran yang diberikan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan, investor, dan regulator